



# Buletin Parlementaria

Nomor 1042/IV/II/2019 • Februari 2019

## Keanekaragaman Hayati Sentani Harus Dijaga



Kodam Sriwijaya Siap Amankan Pemilu

# Keanekaragaman Hayati Sentani Harus Dijaga

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena menjelaskan, Danau Sentani telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu dari 15 danau prioritas nasional. Oleh sebab itu, keanekaragaman hayatinya perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan agar keragaman spesies ikan endemik yang menjadi keunikan dan ciri khas Sentani tidak hilang.



Foto: Eko | Hlr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena menyerahkan bantuan benih ikan kepada masyarakat Sentani.

Menyadari hal tersebut, secara konkrit Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan bibit ikan sebanyak 5000 ekor beserta pakan kepada masyarakat Kampung Yoboi, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bahkan ke depan akan ditambah menjadi 1 juta bibit ikan.

“Sesuai yang disampaikan Direktur Ikan dan Kesehatan Ikan Air Tawar, ke depan akan didatangkan dengan jumlah yang signifikan yakni mencapai 1 juta ekor. Semoga dengan ditambahnya 1 juta ekor ini bisa menambah populasi ikan yang ada di Danau Sentani, secara khusus di Kampung Yoboi,” jelas Michael di Kampung Yoboi, Sentani, Jayapura, Jumat (15/2).

Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah yang turut serta dalam Kunker ini juga terlibat aktif memperhatikan kebutuhan masyarakat Kampung Yoboi. Ia juga ikut menyerahkan bibit ikan didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri.

Penyerahan bantuan bibit ikan kepada masyarakat Kampung Yoboi untuk menambah jumlah populasi ikan air tawar di Sentani khususnya di Kampung Yoboi. Sehingga

diharapkan, melalui penyerahan ikan tersebut berpotensi memberikan dampak positif terlebih khusus terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat peternak ikan di kampung itu.

Budi daya ikan di Danau Sentani harus dilakukan mengingat dari waktu ke waktu populasi ikan air tawar di Danau Sentani semakin berkurang. Sehingga dengan adanya bantuan benih ikan ini bisa kembali meningkatkan populasi ikan air tawar di Danau Sentani.

Pada tahun 1993, Universitas Cendrawasih telah melakukan penelitian keragaman jenis ikan di Danau Sentani, hasilnya dijumpai 35 spesies ikan. Kemudian pada tahun 2016-2017 dilakukan penelitian kembali, hasilnya keragaman ikan yang ada di danau Sentani tinggal 19 spesies saja. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi berkurangnya spesies ikan Danau Sentani, berikut spesies endemiknya, seperti *Glossogobius sentaniensis*, *Chilatherina sentaniensis*, dan *Glossolepis incisus*.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI berpesanan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang berkepentingan agar dalam pemanfaatan Danau Sentani melalui pendekatan kearifan lokal, keseimbangan lingkungan dan memegang prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. ■ eko/sf

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro untuk meningkatkan anggaran konsumsi bagi prajurit yang sedang bertugas mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, dengan beban kerja yang cukup tinggi untuk mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), para prajurit membutuhkan asupan gizi yang cukup.

“Mereka akan bertugas seharian bahkan hingga tengah malam. Jadi mereka membutuhkan



# Kodam Diponegoro Diminta Tingkatkan Anggaran Konsumsi

asupan gizi yang tercukupi untuk menjaga stamina, agar pengamanan Pilpres dan Pileg menjadi lebih kondusif," jelasnya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam IV/Diponegoro beserta jajaran dan Pejabat Mabes TNI di Makodam IV/Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini khawatir, jika prajurit tidak diberikan asupan gizi yang mencukupi, dikhawatirkan dapat menurunkan staminanya. Menurutnya, apabila 2-3 hari tidak mendapat asupan yang cukup, memang tidak bermasalah, tetapi jika sampai

seminggu stamina akan menurun. "Hal ini akan kita upayakan pada pertemuan dengan Panglima TNI agar biaya makan bisa dinaikkan sehingga ketercukupan gizi dapat terjaga," imbuh Kharis.

Sebelumnya Kharis mengatakan, tujuan Kunker Komisi I DPR RI ke Kodam IV/Diponegoro adalah untuk melihat seberapa jauh persiapan dalam mendukung pengamanan Pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang. "Kita jumpai di sini mereka betul-betul sudah siap semuanya. Tinggal menunggu komando untuk di Bawah Kendali Operasi (BKO)-kan ke Kepolisian," kata politisi dapil Jateng ini. ■ cas/sf



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almsyahri memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses meninjau fasilitas Makodam IV/Diponegoro Semarang



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL Ketua PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I,  
Erlangga Panji Samudro, S.Ikoni, Natasya Amanda Prihandini,  
S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske,  
Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,  
Singgih Rimbanu Kinanti, Siti Nadiyah, Rihan Hidayat, Anrimbi  
Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,  
Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,  
Puntho Pranowo.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah  
Gerald Opie.  
**ANALIS MEDIA**  
Ahyar Tibi, Depriisa Citra Akbari,  
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,  
Safitri Restu Widyawati. SIP.  
**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,  
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.  
**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman  
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Kodam Sriwijaya Siap Amankan Pemilu

**Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung menilai kesiapan Kodam II/Sriwijaya terkait tugas pokok dan fungsinya untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah baik.**



Foto: Andri I OD

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Azril Hamzah Tanjung

Namun ia berpendapat, persiapan tersebut masih terkendala dengan minimnya alat kelengkapan, sebab saat ini TNI tidak terlibat langsung dengan pasukan Pengendalian Huru Hara (PHH). Menurutnya, persiapan Kodam II/Sriwijaya sudah mencapai 80 persen. “Memang masih ada 20 persen itu karena alat kelengkapannya masih kurang, karena selama ini kita tidak terlibat dengan yang namanya pasukan PPH. Itu di bawah kendali kepolisian, tapi zaman dulu iya (terlibat),” jelas Asril memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, para Danrem, dan para Dandim beserta jajaran di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (18/2).

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan Kodam II/Sriwijaya saat ini sudah melakukan latihan rutin, baik secara fisik ataupun mental untuk menghadapi situasi terburuk saat menjelang hingga hasil perhitungan Pemilu selesai. Tetapi persiapan itu perlu didukung dengan koordinasi yang menyeluruh antar penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, serta Kepolisian dan pemerintah daerah setempat.

“Kalau secara mental dan latihan mereka sudah siap dan harus dikaji ulang tentang koordinasi-koordinasi dengan penyelenggara Pemilu. Yang masih kurang dengan KPU dan Bawaslu. Tapi kalau dengan sesama TNI, dan dengan Polri itu sudah bagus, termasuk koordinasi dengan pemda 80 persen sudah siap. Tinggal alat kelengkapannya dilengkapi,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta I itu. ■ **nap/sf**

**Kesiapan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung suksesnya Pemilu 2019 masih terkendala oleh masalah penyelesaian KTP Elektronik. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Malut dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Malut, bahwa masih tersisa sekitar 83 ribu KTP-elektronik (KTP-el) yang harus diselesaikan.**



Foto: Desvriandil Htr

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Maluku

# Komisi II Pastikan Hak Pilih Warga Binaan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta hak pilih warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) agar dapat diperhatikan, sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang.

Ia menegaskan, mereka punya hak yang sama dengan hak warga negara lainnya.

“Kita ingin memastikan bahwa hak seluruh warga binaan di lapas tidak terabaikan, bagaimanapun warga binaan ini adalah warga negara Indonesia,” kata Nihayatul di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan, di Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (14/2). Turut mendampingi Wali Kota Tarakan Sofian Raga dan sejumlah mitra kerja terkait,

Untuk memastikan hak pilih warga binaan di seluruh lapas dapat terpenuhi, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ninik ini mendorong pemerintah setempat agar tetap memprioritaskan pelayanan perekaman di lingkungan lapas. Mengingat, masih banyak warga binaan yang melakukan perekaman.

“Salah satu yang penting adalah hak identitas. Oleh sebab itu jika sampai masih ada tambahan warga binaan yg masuk dan belum memiliki KTP-elektronik, mohon segera dikomunikasikan dengan Dukcapil. Jangan sampai ada satu warga pun yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan KTP-elektronik,” sambung legislator dapil Jawa Timur itu. ■ **ann/sf**



Foto: Anne | Hf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh bersama Tim Kunker Reses meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan, di Provinsi Kaltara

## 83 Ribu Warga Malut Belum Miliki KTP-el

“Persoalan KTP Elektronik (di Malut) masih menyimpan banyak persoalan yang harus kami bahas. Dinas Dukcapil Provinsi Maluku Utara sempat menyampaikan, masih tersisa sekitar 83 ribu orang warga yang belum memiliki KTP Elektronik. Hal ini tentu saja masih jauh dari target yang diharapkan,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Malut,

Kamis (14/2).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa ikut memilih dalam Pemilu 2019 adalah memiliki KTP-el. “Ini adalah temuan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan Pemilu 2019,” ujarnya.

Masih dalam rangkaian Kunker ke Malut, Komisi II DPR RI juga melakukan

pengawasan terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Malut. Dalam pertemuan dengan seluruh Kepala Kantor BPN di 10 kabupaten/kota di Malut, dilaporkan mengenai target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan serapan anggaran.

“Pada prinsipnya semua sudah *on the track*. Meskipun masih banyak hambatan dan masalah yang tentu akan kami selesaikan. Sebagian besar temuan-temuan dari Ombudsman adalah terkait dengan persoalan infrastruktur,” tandas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ **dep/sf**

**Waki Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi terobosan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah memetakan dengan cermat potensi masalah dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.**

“KPU dan Bawaslu NTB telah memetakan dengan baik masalah-masalah seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) baru kaum milenial, pemilih tambahan di luar negeri baik TKI atau pelajar, kekurangan kebutuhan logistik formulir dan surat suara, serta rekapitulasi suara yang perlu di sesuaikan kembali targetnya,” puji Mardani setelah memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu se-NTB, baru-baru ini.

Problem yang dirasakan paling mencolok adalah rekapitulasi suara. Legislator F-PKS ini menyarankan agar dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) yang intens kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menggenjot perhitungan suara di TPS. “Karena kalau tidak tercapai berarti melanggar undang-

## Potensi Masalah Pemilu di NTB Sudah Terpetakan



Waki Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dengan KPU dan Bawaslu se-NTB.

undang,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyampaikan, penting bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan pemetaan guna mengantisipasi

segala kemungkinan yang akan terjadi nanti sebelum dan pasca penghitungan suara, serta penting juga merumuskan solusi terbaik dalam mengatasinya. ■ **gd/es/sf**

**Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.**

**S**tasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal dan merusak (*illegal dan destructive*) dinilai sudah berjalan dengan baik.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI saat pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala PSDKP Belawan serta instansi terkait lainnya, di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat, (14/2).

## Pencegahan Illegal Fishing Berjalan Baik



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memimpin Tim Kunker Reses bertemu dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala PSDKP Belawan.

“Kami memberikan apresiasi kepada KKP karena fakta-fakta menunjukkan bahwa *illegal fishing* sudah menurun setiap tahunnya dan produksi tangkapan ikan semakin besar. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari usaha KKP dimana selama ini sebagai mitra kerja Komisi IV dan kami siap memberikan dukungan sepenuhnya,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Namun di sisi lain Roem mengingatkan, agar produksi ikan yang semakin meningkat ini jangan hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha besar saja tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh para nelayan yang menangkap ikan. “Karena ikan-ikan tangkapan mereka merupakan sebuah komoditas ekspor, sehingga mereka juga harus merasakan hasilnya agar nantinya pendapatan mereka itu juga

# Kinerja Kajati Sumsel Diapresiasi



Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir bertukar cenderamata dengan Kajati Sumsel di Palembang

Foto: Husen | Od

meningkat,” jelas Roem.

Untuk itu, legislator daerah pemilihan Gorontalo ini berharap KKP bisa mengantisipasi terhadap seluruh pelayanan-pelayanan pada rakyat khususnya bantuan permodalan. Mengingat bantuan permodalan yang diberikan oleh KKP cukup membantu para nelayan. “Namun terkadang masalah pencairan yang cukup lama menjadi suatu hambatan. Oleh karena itu saya mengimbau agar hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” harap Roem.

Terakhir, terkait perkembangan teknologi yang berkembang pesat, Roem mengingatkan kepada pemerintah untuk turut serta menyediakan suatu sarana prasarana teknologi dalam tracking suatu kegiatan kejahatan di laut. Dengan adanya sistem *monitoring* dan pengawasan kelautan yang baik nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

■ tra/sf

**Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) diapresiasi Komisi III DPR RI. Bahkan, Ali Mukartono sebagai Kajati Sumsel pernah mendapat penghargaan pula dari Wakil Presiden Jusuf Kalla atas pengawasan pembangunan beberapa sarana olahraga pada Asian Games 2018 lalu.**

**K**etua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan, Kajati Sumsel Ali Mukartono perlu mendapat *reward* berupa penempatan jabatan ke posisi yang lebih tinggi.

“Kejaksaan Tinggi Sumsel sudah mendapat penghargaan dari Wapres. Itu sudah *excellent* atau luar biasa.

Tinggal Kajati belum dapat *reward*. Nah, kita akan usul menempatkannya pada posisi yang bagus. Kan, wajar kalau dapat *reward*,” kata Kahar usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejati Sumsel di Palembang, Kamis (14/2).

Sementara Kajati sendiri mengungkapkan, selain penghargaan dari Wapres, pihaknya juga mendapat penghargaan pengelolaan keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan ia mengaku tak terpikir akan *reward* itu.

“Kami waktu itu hanya memikirkan Asian Games. Kita kawal pembangunan *venue* olahraga di Jakabaring agar baik dari sisi kualitas maupun dari kebocoran anggaran. Pada November kami diberi penghargaan. Itu hasil jerih payah kami. Kemudian kami juga dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas pengelolaan keuangan,” ungkap Ali. ■ mh/sf

# Komisi III Pantau Kesiapan Polda Papua Hadapi Pemilu 2019



Foto: Eka Hindra | Od

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI memantau kesiapan Polda Papua menghadapi Pemilu 2019

**Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI memantau kesiapan Polda Papua dalam upaya memberikan layanan keamanan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.**

Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memimpin Tim Kunker Komisi III DPR RI ini mengatakan, pihaknya menekankan kepada jajaran Polda Papua untuk memberikan perhatian secara khusus pada pelaksanaan Pemilu di Papua.

“Hasil pantauan Komisi III, Polda Papua memiliki tugas yang perlu dipantau secara khusus. Kapolda Papua Martuani Sormin telah memaparkan tentang persiapan pengamanan Pemilu 2019 yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang sudah mantap,” tegas Erma usai pertemuan dengan Kapolda Papua beserta jajaran di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (15/2).

Erma menambahkan, sebagaimana dipaparkan Kapolda Papua, tidak ada masalah dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden, karena hanya 2 kontestan. “Namun yang menjadi kendala yaitu saat

Pemilihan Calon Legislatif, dimana banyak caleg yang dimungkinkan terjadi kendala. Apalagi yang disampaikan Kapolda, dimana ada 7 Komisioner KPU di daerah yang masih berkonflik dan belum dilantik sampai saat ini,” katanya.

Disinggung mengenai rawannya

keamanan di Kabupaten Nduga, legislator Partai Demokrat itu mengatakan Komisi III DPR RI mendukung upaya Polda Papua untuk membangun Polres di Nduga. Namun harus dikaji lebih dalam mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan. ■ hr/sf

## Komisi III Apresiasi Polda Jatim Ungkap Prostitusi Online

**Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur atas prestasinya mengungkap kasus prostitusi online yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim beberapa waktu lalu.**

Menurutnya, terungkapnya kasus prostitusi online yang viral di media masa ini sangat berdampak luas pada Polda di daerah lain.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur atas prestasinya mengungkap kasus prostitusi online yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim beberapa waktu lalu. Menurutnya, terungkapnya kasus

Sebagai salah satu ikon pariwisata di Manado, TN Bunaken telah memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas pengembangan pariwisata TN Bunaken yang tetap menjaga pelestarian kekayaan di bawah laut.

“Namun, untuk terus mengembangkan pariwisata itu perlu peran semua pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah, swasta maupun masyarakat dalam mengelola Taman Nasional Bunaken ini,” jelas Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau TN Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (14/02).

Usai meninjau keindahan alam menggunakan kapal wisata, Edhy menyampaikan masih ada beberapa hal yang perlu diupayakan Komisi IV DPR RI dalam melestarikan TN Bunaken tersebut. “Dalam pengelolaan masih membutuhkan dukungan, mulai dari peningkatan anggaran, infrastruktur hingga bantuan kapal pariwisata untuk wisata edukasi,” terangnya seraya menyatakan akan mendorong peningkatan anggaran bagi pengembangan pariwisata Bunaken.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Ia menilai TN Bunaken memiliki potensi yang bisa berlangsung bagi generasi penerus. “Tercatat sekitar 2000 spesies ikan tropis dan 390 jenis karang yang ada di Bunaken. Untuk itu Taman Nasional Bunaken ini perlu dilestarikan dan dijaga,” jelasnya. ■

rmm/sf

## TN Bunaken Harus Dilestarikan

**Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan, kekayaan laut yang ada di Taman Nasional (TN) Bunaken perlu dijaga dan dilestarikan sebagai warisan untuk generasi di masa depan.**



Foto: Eko | Hlr

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa

Suciati | Od

prostitusi online yang viral di media masa ini sangat berdampak luas pada Polda di daerah lain.

“Tentunya Komisi III tidak sekedar mengapresiasi, kami juga akan memperkuat agar optimal di bidang ini,” kata politisi Partai Gerindra itu usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran penegak hukum Jawa Timur di Gedung Mahameru Markas Polda Jatim,

**“... terkait keberhasilan Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online sebenarnya merupakan suksesnya Polri secara keseluruhan. Di tengah perkembangan pesat teknologi digital, kini Polri telah meningkatkan kualitas infrastruktur siber.”**

Surabaya, Senin (18/2).

Anggota Komisi III DPR RI Herman Hery yang turut serta dalam Kunker ke Jawa Timur ini menambahkan, terkait keberhasilan Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online sebenarnya merupakan suksesnya Polri secara keseluruhan. Di tengah perkembangan pesat teknologi digital, kini Polri telah meningkatkan kualitas infrastruktur siber.

“Komisi III mendukung Polri dalam hal anggaran untuk meningkatkan infrastruktur teknologi. Maka dari itu, kasus prostitusi online bisa ditangkap dengan cara-cara teknologi. Polri sangat siap melakukan pemberantasan kejahatan dengan menggunakan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

■ sc/sf



Foto: Jaka | Od

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Belang-belang, Mamuju, Sulawesi Barat.

## Komisi V Pantau Pembangunan Jalan Pelabuhan Belang-belang

**Progres pembangunan jalan memotong untuk mempercepat jalur masuk ke Pelabuhan Belang-belang dinilai tidak menemui kendala.**

**N**amun, ada sedikit permasalahan mengenai pembebasan lahan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menekankan perlu adanya konsolidasi yang melibatkan pihak pemerintah daerah dalam pembebasan lahan ini. Selain itu, peningkatan ekspor melalui Pelabuhan Belang-belang juga perlu didukung tambahan dermaga.

“Mereka mengalami kesulitan (meningkatkan ekspor) karena membutuhkan tambahan dermaga untuk container. Saya kira usulan ini diajukan saja, nanti kita dorong dalam pembahasan dengan Kementerian Perhubungan. Selain

“Pelabuhan Belang-belang ini bisa juga menjadi pengumpul barang-barang yang ada di wilayah Sulbar. Karena ada beberapa produk potensial seperti sawit, minyak, rotan dan batu bara.”

itu perlu dipikirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sini, salah satunya dengan ekspor barang-barang atau produk yang ada di wilayah ini,” kata Ibnu di sela-sela memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Belang-belang, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (14/2).

Menurut politisi Partai Golkar ini, Pelabuhan Belang-belang ini bisa juga menjadi pengumpul barang-barang yang ada di wilayah Sulbar. Karena ada beberapa produk potensial seperti sawit, minyak, rotan dan batu bara. “Saya kira ke depan, Pelabuhan Belang-belang ini akan menumbuhkan ekonomi,” imbuhnya.

Ibnu menilai, letak pelabuhan ini sangat strategis. Termasuk jika dilihat dari kedalaman laut memungkinkan kapal-kapal besar bisa sandar di pelabuhan. Selain itu, jika dilihat posisinya juga cukup aman, ada pulau terluar, sehingga tidak mengganggu kapal untuk bersandar. Politisi dapil Sulbar ini yakin, pelabuhan ini efektif untuk penggunaan atau pengangkutan hasil bumi ataupun apa yang ada di Sulbar. ■ **jk/sf**



# Komisi V Tinjau Infrastruktur Probolinggo

**Tim Kunjungan Kerja Reses  
Komisi V DPR RI dipimpin Wakil  
Ketua Komisi V DPR RI Anton  
Sukartono Suratto meninjau  
sejumlah pembangunan  
infrastruktur di Kabupaten  
Probolinggo dan Kota  
Probolinggo.**

**T**im Kunker memulai perjalanannya dengan meninjau dan melihat secara langsung pembangunan ruas Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang akan dioperasikan dalam waktu dekat ini.

“Setelah kita melewati Tol Paspro ini, Alhamdulillah Tol Paspro sudah sangat layak dan aman. Insya Allah paling lama

dalam sebulan lagi bisa diresmikan,” kata Anton di sela-sela memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau progress pembangunan Tol Paspro, Kamis (14/2).

Legislator Partai Demokrat itu mengharapkan, dengan adanya tol Paspro sepanjang 31,3 kilometer ini, diharapkan

**“Keberadaan Stasiun Probolinggo sebagai cagar budaya tidak boleh diganggu dan dipugar. Maka ke depannya untuk pengembangan, mungkin perlu diperlebar kiri dan kanannya saja, serta relnya diperbesar agar bisa dilalui kereta api dengan kecepatan tinggi.”**

dapat memangkas waktu perjalanan menjadi lebih cepat dari sebelumnya yang mencapai 2-3 jam menjadi 1 jam, dan juga peningkatan ekonomi lokal.

Usai meninjau tol Paspro, tim Kunker Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanannya menuju Stasiun Kereta Api (KA) Probolinggo untuk memantau kondisi sarana dan prasarana serta fisik bangunan stasiun yang pada tahun 2003 ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Probolinggo. “Keberadaan Stasiun Probolinggo sebagai cagar budaya tidak boleh diganggu dan dipugar. Maka ke depannya untuk pengembangan, mungkin perlu diperlebar kiri dan kanannya saja, serta relnya diperbesar agar bisa dilalui kereta api dengan kecepatan tinggi,” jelas legislator dapil Jawa Barat itu.

Setelah dari Stasiun Probolinggo, Tim Kunker melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Tongas-Lumbang melewati jalan Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dan peninjauan infrastruktur pariwisata nasional terkait Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gunung Bromo. ■ nt/sf



Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto meninjau pembangunan ruas Tol Pasuruan-Probolinggo.

Foto: Nita | Od

# Komisi VI Tunggu Hasil Revitalisasi PG Mojo



Foto: Sofyani | Od

Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng memimpin Tim Kunker Reses meninjau fasilitas PG Mojo, di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

## PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX mendapat alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun.

Rencananya, anggaran itu digunakan untuk revitalisasi Pabrik Gula (PG) Mojo sebesar Rp 225 miliar, revitalisasi PG Rendeng sebesar Rp 225 miliar, dan pembangunan PG baru sebesar Rp 550 miliar. Revitalisasi PG Mojo sudah dimulai, dan dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng menilai, guna melihat efektivitas PMN yang sudah digelontorkan dari keuangan negara, pihaknya menunggu hasil revitalisasi PG Mojo, termasuk hasil produksinya.

“Revitalisasi ini termasuk program baru yang belum pernah ada (di PTPN IX). Kita akan melihat dulu bagaimana hasil dari revitalisasi yang sekarang dilakukan. Kalau ini memang sukses, ya berarti mungkin kita support juga untuk pabrik-pabrik yang lain. Ini evaluasi kita sebagai fungsi pengawasan dan anggaran yang sudah menyetujui PMN untuk diturunkan kepada PTPN IX,” kata Martri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI

meninjau fasilitas PG Mojo, di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (14/2).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, untuk melihat hasil revitalisasi PG ini, pihaknya menunggu hasil giling PG Mojo pada Mei 2019 mendatang. Menurutnya, jika hasil rendemen dan serapan tebu dari petani meningkat, berarti bisa dikatakan revitalisasi ini sukses. Hal ini juga bisa diartikan revitalisasi menjadi solusi dalam meningkatkan produksi PG. Namun jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, berarti revitalisasi bukan solusi bagi produksi gula nasional, justru menjadi pemborosan bagi keuangan negara.

“Saya kira itu yang harus kita awasi bersama. Makanya saya pertanyakan, persoalan produktivitasnya apakah benar semata karena dari mesin, pabrik, atau kaitannya dengan produksi tebu dari petani. Itu kan perlu dilihat. Karena yang saya tahu, dari beberapa informasi, produktivitas petani Jawa Tengah memang lebih rendah dari petani Jawa Timur. Itu menjadi PR lagi, bagaimana meningkatkan produktivitas petani, supaya nanti faktor rendemen tidak semata-mata karena dari fungsi pabrik, tapi bahan bakunya juga harus dievaluasi,” analisa Martri. ■ sf

## Program Papua Terang yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sudah mencapai 99,9 persen.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Ridwan Hisjam menilai, program tersebut sudah dinyatakan berhasil, jika dilihat dari rasio elektrifikasi untuk mewujudkan Papua Terang 2019.

“Kami sempat meragukan data yang diberikan kepada Komisi VII DPR RI, tapi setelah dijelaskan maka sudah terlaksana dengan baik,” tutur Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Klaseman, PLN Regional Bisnis Maluku Papua, di Provinsi Papua Barat, Kamis (14/2).

Dalam kesempatan tersebut,

“ Dalam *roadmap* ketahanan energi Indonesia hingga 2025, harus ada energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi mengatasi tingkat kebutuhan energi masyarakat yang makin tinggi,” kata Gus Irawan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran di Gedung DPRD Bali, Kamis (14/2).

Lebih lanjut legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, berbagai regulasi dan kebijakan mulai dirancang Pemerintah Provinsi Bali, satu diantaranya adalah akan diterapkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan berupa sepeda motor dan mobil listrik.

“Kita lihat kondisinya, kendaraan bermotor yang kita gunakan menggunakan energi dari minyak mentah. Lantas mesin pembangkit listrik yang dibangun pun, dulunya mengutamakan bahan bakar minyak sebagai energi utama,” imbuh Gus Irawan.

Legislator dapil Sumatera Utara itu menambahkan, energi yang bersumber dari minyak akan habis 20 hingga 25 tahun lagi. Negara-negara maju pun sudah mencoba berbagai cara memanfaatkan energi alternatif. Hal itu juga yang harus dilakukan oleh Indonesia.

■ man/sf

## Komisi VII Dukung Bali Kembangkan Energi Terbarukan

**Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendukung keinginan Gubernur Bali Wayan Koster dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) untuk mewujudkan Bali sebagai clean and green energy. Hal ini agar krisis ketersediaan cadangan energi saat ini dapat teratasi.**



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berdialog dengan Gubernur Bali beserta jajarannya di Gedung DPRD Bali.

Foto: Anndri | Od

## Papua Terang Sudah 99,9 Persen



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunker Reses meninjau PLTD Klaseman

PLN juga menjelaskan kebiasaan masyarakat Papua yang sering berpindah-pindah desa dan memekarkan desa yang mengakibatkan rumah yang kosong dan perlu jaringan listrik baru, hal tersebut menjadi beban tersendiri karena kewajiban PLN yang harus tetap menerangi semua masyarakat Papua.

“Menanggapi hal itu, saya merasa PLN sudah sangat sigap dalam menanggapi kebiasaan masyarakat Papua yang sering pindah desa melalui program *biomass* yang sudah disiapkan PLN, dengan *biomass* berbahan bakar kayu masyarakat Papua bisa tetap mendapatkan listrik dan biayanya juga murah,” tutur legislator Partai Golkar itu. ■ rh/sf

Foto: Rivan | Od



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

## Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Pengaruhi Perekonomian Mamuju

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, kenaikan tarif tiket pesawat sejumlah maskapai penerbangan, mempengaruhi perekonomian di sejumlah wilayah, termasuk Mamuju, Sulawesi Barat.

Pengguna pesawat terbang dari Mamuju ke tempat lain turut merasakan dampaknya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pertamina, sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI untuk melakukan investigasi penyebab naiknya tarif tiket pesawat.

“Kita tidak bisa membiarkan harga tiket yang melampaui kewajaran, sebab mengganggu seluruh sektor perekonomian, baik transportasi kargo maupun transportasi orang. Semua sektor terganggu,” kata Azam usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT. Pertamina dan PT. Garuda Indonesia di Mamuju, Sulbar, Jumat (15/2).

Legislator Partai Demokrat itu menjelaskan, pemerintah harus segera mengambil keputusan yang mendukung untuk mengantisipasi semakin mahalnya tarif tiket maskapai penerbangan. Hal ini agar ekonomi tidak terhenti. Pasalnya, jika mahalnya tarif tiket pesawat ini dibiarkan berlanjut, seluruh sektor akan terganggu.

“Kita tetap berpikir dan berpihak kepada masyarakat. Pengguna *airline* sudah mulai turun. Kita lihat penumpang pesawat di Makassar sudah sepi. Penumpang pesawat di Mamuju dan Cengkareng juga sepi. Itu artinya pergerakan ekonomi tidak berjalan. Menurut Komisi VI ini sudah berbahaya,” tegas Azam.

Azam menilai pemerintah terlambat mengantisipasi kenaikan tarif tiket pesawat ini, sehingga terjadi keresahan dan gejala di tengah masyarakat. Komisi VI DPR RI dari dua bulan lalu sudah mempermasalahkan ini, tetapi kesigapan pemerintah tidak cepat menyelesaikan permasalahan ini. ■ **af/sf**

Foto: Arief | Od



Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf

## Kinerja BUMN Didorong Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Manado

Komisi VI DPR RI berharap kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Sulawesi Utara, agar dapat meningkatkan kinerjanya, serta betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengatakan, profit yang menjadi target BUMN memang penting, namun menggerakkan ekonomi rakyat jauh lebih penting.

“Target BUMN yang harus diutamakan adalah bagaimana ekonomi masyarakat

dapat membaik,” kata Mustofa saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN, antara lain PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelindo IV, dan PT. Telekomunikasi Indonesia di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (14/2).

Foto: Icha | Od

# Pasokan Listrik Sultra Surplus



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau PT. DSSP Power Kendari

Foto: Hendra Iot

Politisi Fraksi PPP tersebut menambahkan, dalam pertemuan mengemuka tarif tiket maskapai Garuda Indonesia yang cukup melonjak akhir-akhir ini. Pihaknya meminta kepada PT. Garuda Indonesia Tbk untuk melakukan pembatasan tarif atas bagi seluruh dealer-dealer ataupun biro travel, baik secara langsung maupun *online*.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mengimbau kepada biro-biro travel, termasuk biro travel *online*, untuk dapat mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh Garuda Indonesia. "Kita meminta Garuda Indonesia untuk memberikan sanksi apabila ada biro travel yang menjual harga tiketnya di atas ketentuan yang berlaku," jelas Anggota Komisi VI DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II itu.

■ ica/sf

**Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam mendapatkan informasi bahwa meskipun infrastruktur yang ada di Sulawesi Tenggara masih minim jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, namun pasokan listrik dipastikan aman ketersediaannya.**

**B**ahkan, dengan surplusnya pasokan listrik ini, kini sudah didistribusikan hingga ke luar Sultra.

"PLN menjamin bahwa ketersediaan listrik di Sulawesi Tenggara ini sangat menjanjikan karena banyak cadangan-cadangan dan pemakaian menunggu," ujar Ihwan usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. DSSP Power Kendari dan PT. PLN di Konawe Selatan, Sultra, Kamis (14/2).

Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI akan selalu siap memberikan dukungan kepada PLN, guna memastikan ketersediaan listrik di sejumlah daerah. Hal ini penting karena listrik adalah kebutuhan vital bagi setiap warga negara.

"Kita kan selalu support PLN. Juga disampaikan kepada kami bahwa ketersediaan listrik secara nasional itu sudah tercapai. Target di Sulawesi Tenggara itu 99.9 persen. Kalau memang nanti belum tercapai, ya kita akan dorong ke PLN untuk melakukan sambungan ke masyarakat di desa," ungkap Ihwan.

Saat meninjau PT. DSSP Power Kendari, hal yang paling disoroti Komisi VII DPR RI adalah kesiapan perusahaan dalam mengutamakan tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan. Pun telah disampaikan bahwa PT. DSSP telah mempekerjakan 90 persen tenaga kerja lokal yang berada di daerah sekitar perusahaan. ■ hs/sf

# Komisi IX Apresiasi Ketersediaan Fasilitas RSUD Sumedang



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meninjau fasilitas dan sarana prasarana RSUD Sumedang

**Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang, Jawa Barat.**

**M**enurutnya dari beberapa sisi yang menjadi perhatian oleh Komisi IX DPR RI ternyata RSUD Sumedang ini sudah memiliki terlebih dahulu, sehingga menurutnya ini menjadi poin yang bagus untuk mereka.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau fasilitas dan sarana prasarana RSUD Sumedang, di Jawa Barat, baru-baru ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian menurut Ermalena adalah kelas kamar tiga transit yang selalu menjadi permasalahan dan temuan di setiap rumah sakit yang disambangi.

Foto: Angga | Od

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan, pihaknya mendorong agar pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan.**

**I**a pun berharap pembiayaan pembangunan melalui SBSN ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai ditemukan pelanggaran di dalam pemakaian anggaran. Selain melanggar Undang-Undang, ini juga bersumber dari keuangan Islam,” tegas Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau pembangunan ruang kelas Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Batam yang dibangun dengan pembiayaan melalui SBSN, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (14/2).

Legislator F-PKB ini menambahkan, Kunker Komisi VIII DPR ke Batam ini untuk memastikan secara langsung

# Pembiayaan SBSN Didorong Percepat Pembangunan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang

Foto: Nathan | Od

“Karena biasanya di rumah sakit lain masalahnya adalah banyak sekali pasien yang naik kelas atau dinaikkelaskan, kemudian bermasalah di belakang hari terutama masalah pembiayaan. Namun di sini saya kira tidak terjadi itu. Jadi bagus untuk kualitas RSUD ini,” tutur Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Selain itu ia juga menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) RSUD Sumedang telah cukup memadai, karena perhitungan antara jumlah pasien dengan perawat dan dokter yang menangani telah sesuai. Namun ia juga berharap agar pelayanan yang diberikan oleh para SDM tersebut juga maksimal, sehingga tidak menciptakan keluhan bagi para pasien.

“Kita tidak mau dengar ada pasien yang mengeluh di luar, bahwa mereka tidak dilayani. Kenapa tidak dilayani, ternyata memang karena jumlah dokter atau perawat itu terbatas, ini tentunya sangat tidak kita inginkan. Maka kita sampaikan kepada direktur agar pelayanan yang diberikan harus tetap prima,” imbuh politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. ■ **ep/sf**

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 oleh mitra kerja Komisi VIII DPR RI sesuai dengan hasil rapat bersama Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu. Hal ini penting dilakukan, mengingat salah satu tugas dan fungsi DPR RI adalah mengawasi pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah.

**Kunker Komisi VIII DPR ke Batam ini untuk memastikan secara langsung penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 oleh mitra kerja Komisi VIII DPR RI sesuai dengan hasil rapat bersama Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu.**

“Kunjungan kerja kita kali ini selain ingin memastikan apa yang diputuskan oleh para Anggota Komisi VIII DPR RI tentang APBN di bidang mitra kerjanya. Kita juga ingin memastikan bahwa program itu tepat sasaran,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu. ■ **nds/sf**

## Komisi IX Dorong Peningkatan Anggaran RSUD. Dr M. Djamil

**Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mendapat informasi bahwa ruang ICU dan 14 ruang operasi RSUD. Dr M. Djamil, Padang, Sumatera Barat yang tidak berubah selama 34 tahun belakangan.**



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan Direksi RSUD. Dr M. Djamil, Padang

Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf menegaskan pihaknya akan terus mendorong peningkatan anggaran untuk RSUD. Dr M. Djamil.

“Ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat rumah sakit tersebut melayani masyarakat seluruh Sumatera Barat, bahkan bagian Sumatera lainnya,” ujar Nova usai meninjau sarana dan prasarana RSUD. Dr M. Djamil bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, di Padang, Sumbar, Kamis (14/2).

Padahal, kata politisi Partai Demokrat itu, RS besar sangat membutuhkan modernisasi teknologi dari alat-alat kesehatan. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI akan terus mendorong *masterplan* RS tersebut. Meski demikian, ia mengakui untuk perluasan ruang ICU masih terbentur Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang tidak membolehkan RS memperluas

ruang ICU. Namun di sisi lain RS tidak boleh menolak pasien yang datang.

“Kami belum tahu secara pasti Permenkes nomor dan tahun berapa, karena memang itu domain pemerintah. Namun jika aturan atau regulasi tersebut

**RS besar sangat membutuhkan modernisasi teknologi dari alat-alat kesehatan**

dalam perjalanannya menimbulkan sebuah ganjalan dari masyarakat, tentunya kami di DPR RI sesuai tupoksi kami akan mengawasinya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, kami akan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang, bahkan mencabut Permenkes tersebut,” pungkasnya. ■ **ayu/sf**

# Bandara Internasional Kunci Utama Pariwisata Papua Barat



Anggota Komisi X DPR RI Zuhdi Yahya

**Anggota Komisi X DPR RI Zuhdi Yahya mengatakan, pembangunan bandar udara internasional akan menjadi kunci majunya dunia pariwisata di Papua Barat.**

**K**arena Papua Barat, khususnya Raja Ampat sudah termasuk dalam prioritas destinasi wisata Indonesia. Bahkan, banyak wisatawan asing yang tertarik berkunjung ke Raja Ampat.

“Apakah nanti akan dibangun di Waisai atau Sorong, silakan. Kita lihat Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengajukan bandara internasional, saya yakin akan memudahkan wisatawan asing untuk datang,” kata Zuhdi usai pertemuan jajaran Pemprov Papua Barat dan stakeholder bidang pariwisata Papua Barat, di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (15/2).

Pada pertemuan dengan Pemprov Papua Barat dan stakeholder pariwisata yang ada di Papua Barat, selain mengusulkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota melalui Dinas Pariwisata Provinsi untuk menyampaikan roadmap atau blueprint seluruh potensi pariwisata, Komisi X DPR RI juga meminta antar destinasi wisata yang Papua Barat untuk saling terkoneksi.

“Jadi apabila para turis datang, mereka tidak hanya ke Raja Ampat. Begitu turun di Sorong, ada wisata apa di Sorong, di Tambrauw apa, begitupun dengan sekitarnya. Jadi ada semacam paket wisata. Dan pembangunan ini tidak bisa sendiri, semuanya harus saling mendukung,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu. ■ es/sf

Foto: Emani | Od

# Pemerintah Diminta Lengkapi Alkes RS

**Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan tambahan alat-alat kesehatan (alkes) yang masih dibutuhkan rumah sakit.**

Khususnya kepada RS yang konsisten mendukung program BPJS Kesehatan, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Harapan kepada pemerintah pusat agar membantu peralatan-peralatan kedokteran, karena rumah sakit yang sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik ini harusnya mendapat perhatian. Bonusnya berupa bantuan tambahan peralatan medis,” ujar Syam saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalsel, Jumat (15/2/).

Pemberian obat kepada pasien peserta BPJS Kesehatan juga menjadi



Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam

Foto: Rizka | Od

# Komisi X Dukung Pembangunan Perpustakaan Baru di Ambon



Foto: Singgih I Od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Daerah Ambon.

salah satu fokus perhatiannya setiap mengunjungi RS di berbagai lokasi. Karena menurut Syam, masih banyak RS yang menjadi rujukan pasien BPJS Kesehatan tidak memberikan obat dengan alasan RS tersebut tidak memiliki stok obat yang diperlukan.

Akibatnya tak jarang pasien harus membeli obat tersebut ke apotek di luar RS. “Di sini sudah bagus, karena dalam kontrak BPJS, pasien ditanggung hingga sembuh. Bukan berapa banyak obat yang dikonsumsi atau lama perawatan itu jadi tanggungan,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Selain itu, alokasi kapasitas ruang dan tempat tidur pelayanan untuk pasien peserta BPJS kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin menurutnya juga sudah baik. Dimana dari total kapasitas pasien di RS ini sudah 50 persen diantaranya merupakan kamar dan layanan kelas 3. Dan dari jumlah tersebut, 70 persen pasien yang dilayani merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan. ■ ran/sf

## Perpustakaan Daerah Kota Ambon harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengingat kondisi perpustakaan yang kurang representatif, ruangan sangat sempit dan koleksi bukunya yang sangat kurang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, untuk membangun perpustakaan baru, pihaknya sudah meminta kepada Pemerintah Kota Ambon untuk menyediakan lahan seluas 3000 meter persegi.

“Sehingga sesuai dengan prasyarat dan masuk ke dalam sistem di Bappenas. Kemudian disediakan *Detail Engineering Design (DED)*, Pemerintah Kota Ambon menyanggupinya. Sehingga pada 2019 ini akan diajukan. Tahun 2020 akan mendapatkan tempat yang representasi untuk Perpustakaan Kota Ambon ini,” ungkap Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Ambon, Jumat (16/2).

Fikri juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Perpustakaan Kota Ambon akan mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 225 juta dan 22 ribu buku. Diharapkan, pengelolaan dana tersebut berjalan dengan baik. “Solusi untuk menutupi kekurangan tersebut yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan membina 23 perpustakaan desa yang ada di Kota Ambon ini,” ungkapnya.

Sementara itu Legislator PDI-Perjuangan My Esti Wijayanti menambahkan, karena besarnya potensi yang dimiliki Perpustakaan Kota Ambon, maka perpustakaan itu akan mendapat kucuran bantuan dana sebesar Rp 225 juta untuk anggaran pengadaan buku. Pengurus perpustakaan sendiri yang akan membelanjakan jenis buku-buku yang dibutuhkan dan layak.

Terkait dengan penancangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Esti berpesan, agar setiap perpustakaan memiliki *music corner*. “Seharusnya setiap perpustakaan baik provinsi, kota dan desa memiliki *music corner*, dan koleksi-koleksi buku musik baik teknik bermain musik atau sebagainya. Dan ornamen berbau musik, sehingga lebih terasa nuansa kota musik dunia,” tutupnya. ■ skr/sf

# Komisi X Tinjau Persiapan Papua Hadapi PON XX 2020

**Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau persiapan Papua dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.**

X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah *stakeholder*, di Sasana Karya Kantor Gubernur Jayapura, Jumat (15/2).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa pihaknya juga mengajak para mitra kerja agar mendukung kegiatan olahraga tersebut untuk tidak terpisah dari upaya-upaya lain seperti pendidikan, membangun pariwisata dan ekonomi

Papua yang dipercaya menjadi tuan rumah pesta olahraga nasional empat tahunan ini telah menyelesaikan kurang lebih 97 persen untuk pembangunan Stadion Papua Bangkit.

"Kami optimis Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik, pasti terdapat kekurangan atau hal yang belum bisa diselesaikan ini merupakan suatu kewajaran dan bisa menjadi komunikasi dalam membangun kesamaan-kesamaan atas perbedaan persepsi," kata Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi

**"Kami optimis Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik, pasti terdapat kekurangan atau hal yang belum bisa diselesaikan ini merupakan suatu kewajaran dan bisa menjadi komunikasi dalam membangun kesamaan-kesamaan atas perbedaan persepsi,"**



Foto: Chasbiji | Od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

**Anggota Komisi XI DPR RI Fathan optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat. Hal itu terlihat dari perkembangan Perbankan Jawa Tengah yang tumbuh positif.**

Duta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan, aset perbankan Jateng mencapai Rp 415,3 triliun atau tumbuh 4,47 persen. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 310,4 triliun, atau tumbuh 8,85 persen, dan kredit mencapai Rp 302, triliun atau tumbuh sebesar 8,63.

"Komisi XI DPR RI memantau dinamika perkembangan perekonomian di Jawa Tengah. Kami sudah bertemu dengan Gubernur dan industri keuangan. Dari laporan Bank Indonesia dan OJK, kita cukup optimis Jawa Tengah bagus untuk pertumbuhan ekonomi," kata Fathan di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR dengan BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Non Bank, di

# Komisi XI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jateng Meningkatkan



Foto: Kiky | Od

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan

kreatif. Sehingga capaian bukan hanya hasil prestasi olahraganya saja, tapi juga Papua bisa maju secara ekonomi baik olahraga, pendidikan, pariwisata maupun bidang ekonomi kreatifnya.

“Selain olahraga, ada hal lain yang menjadi sorotan penting yakni permasalahan pendidikan yang ada di Papua. Kami mendapat masukan-masukan dari para rektor universitas di Papua agar kebijakan-kebijakan yang ada di pusat mampu merespon situasi yang ada di daerah, jadi semua kebijakan harus berbasis fakta dan realita yang ada di lapangan,” tambah Hetifah.

Fakta dan informasi yang dikemukakan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi masukan bagi pihaknya untuk membuat kebijakan agar lebih ramah terhadap daerah khusus seperti Papua. “Kami berharap agar Papua mendapatkan *support* yang lebih serius di tahun yang akan datang. Perhatian terhadap pendidikan seperti mahasiswa Papua yang perlu didukung dalam hal beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih mangkrak ini perlu lebih dipikirkan oleh pemerintah pusat,” tutup Hetifah. ■ **cas/sf**

Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/2).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Jateng menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar se-Indonesia yang mencapai Rp 21,22 triliun pada tahun 2018 yang patut diapresiasi dan menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya. “Jawa Tengah mampu menyerap KUR di atas 100 persen secara nasional. Jadi juara satu secara nasional menyerap KUR,” kata Fathan.

Di sisi lain, Fathan menyoroti maraknya pinjaman *online* atau *financial technology* (*fintech*) ilegal di tengah masyarakat, bukan hanya di Jateng, tapi juga nasional. Ia mendorong OJK dan seluruh lembaga keuangan untuk memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat, serta mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan apabila mengetahui adanya *fintech* ilegal.

“Maraknya *fintech* ilegal ini, sebetulnya OJK dan seluruh lembaga keuangan harus memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terkena rayuan dan diiming-imingi bunga yang tinggi,” tutup legislator dapil Jawa Tengah III ini.

■ **qq/sf**

## Komisi XI Dorong Peningkatan Ekonomi NTB Pasca Gempa



Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar

**Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI memantau perkembangan kondisi ekonomi, dan permasalahan yang terjadi pasca gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.**

**A**nggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menjelaskan, Komisi XI DPR RI mengunjungi NTB terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, termasuk dana yang ditransfer ke NTB.

“Komisi XI bersama seluruh mitra kerja melakukan rapat kerja, terkait untuk NTB. Jadi yang pertama akibat dampak gempa kemarin, dari sisi mengkoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Yang kedua *recovery* kepada korban sudah dimulai, tetapi tetap membutuhkan proses dan waktu,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Mataram, NTB, Kamis (14/2).

Dalam pertemuan yang dihadiri BI, OJK, BPS, Perbankan PT. Askrido, Perum Jamkrindo, Kanwil Kementerian Keuangan,

Kanwil BPK, Kanwil BPKP, Pemerintah Provinsi NTB, Willgo memastikan bahwa hal ini merupakan atensi khusus DPR RI dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB melalui sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian.

Berdasarkan pantauan Willgo, salah satu kendala pada sektor pariwisata yang harus segera dicarikan solusinya, yakni tarif tiket yang semakin meroket dan kebijakan bagasi berbayar. Akibat mahalannya tarif tiket pesawat, sehingga beberapa penerbangan pun membatalkan atau meniadakan penerbangan. Imbasnya, frekuensi penerbangan berkurang. Sedangkan masalah bagasi berbayar ini juga berdampak merosotnya omset UMKM masyarakat NTB, yang mana memproduksi souvenir, barang, makanan, dan sebagainya.

Selain itu, sektor perbankan juga harus tetap mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha rakyat UMKM terutama yang terkait dengan industri pariwisata. “OJK harus lebih berperan lagi agar KUR ini lebih banyak kepada sektor mikro dan sektor kecil. Tidak hanya kepada sektor retail terutama pada sektor perdagangan, tapi juga bisa mendorong sektor pertanian, sektor produksi, dan juga sektor industri kreatif,” imbuh legislator dapil NTB itu.

■ **as/sf**

# Pertumbuhan Ekonomi Sumut Cukup Baik

**Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah cukup baik.**

**D**ijelaskannya, berdasarkan data pada Triwulan I tahun anggaran 2019, perekonomian Sumut masih berjalan sesuai dengan pola historisnya yang berada pada level 4,7 persen sampai dengan 5,1 persen.

“Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sudah cukup baik. Meski demikian kita harus tetap mewaspadai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi yang ada, karena perekonomian negara kita dipengaruhi juga oleh

perbenturan perekonomian dunia,” ucap Sukiman di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Sumut, Kamis (14/2).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, memang pada beberapa Triwulan pada tahun 2018 masih terjadi inflasi. Inflasi di Triwulan IV diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan III 2018, hal itu

**Sukiman meminta pemerintah memberikan perhatian pada komoditas sawit dan kopi di Sumut, dan karet yang menjadi prioritas utama Sumut.**

dikarenakan adanya resiko kenaikan harga yang bersumber dari kelompok bahan makanan dan transportasi.

Di sisi lain, Sukiman meminta Pemerintah memberikan perhatian pada komoditas sawit dan kopi di Sumut, dan karet yang menjadi prioritas utama Sumut. “Oleh karena itu kita berharap agar komoditas ini juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, demi menjaga stabilitas ekonomi secara baik dan sehat,” tegasnya Legislator Dapil Kalimantan Barat itu.

Atas prestasi kinerja yang telah dicapai itu, Sukiman memberikan apresiasinya. Ia berharap, kedepannya perekonomian Sumut bisa terus ditingkatkan secara lebih baik lagi. “Banyak hal yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi XI terkait masalah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama menyangkut persoalan pengendalian inflansi dan tentang lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus (Pemerintah), dengan begitu pengendalian inflansi di daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkas Sukiman. ■ **opi/dep/sf**



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara

Foto: Geraldi | Od

# Nakhoda Tak Bisa Diwakilkan



Foto: Kresno | Od

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing berdialog dengan awak kapal di Pelabuhan Ajibata, Parapat, Sumatera Utara

**Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing menegur salah satu awak kapal yang ditugaskan sebagai wakil nakhoda untuk Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ihan Batak di Pelabuhan Ajibata, Parapat, Sumatera Utara. Anthon menegaskan, tidak ada istilah wakil nakhoda, karena menurutnya nakhoda kapal itu hanya satu dan tidak dapat diwakilkan.**

“Apa itu wakil nakhoda? Kapal itu penanggungjawabnya hanya satu nakhoda dan hanya dia yang mempunyai izin mengendalikan kapal. Nakhoda itu bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan,” tegas Anthon saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau KMP Ihan Batak di pelabuhan Ajibata,

Parapat, Sumut, Kamis (14/2).

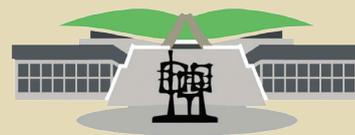
Menurut Anthon, hal itu tidak lazim dan dirinya sudah mengatakan kepada Syahbandar untuk memperbaiki dan mencegah hal itu tidak terjadi lagi karena menurutnya masalah keselamatan itu *zero tolerance*. Tidak ada toleransi dan pengkhususan terhadap masalah keselamatan. Anthon sudah berbicara juga kepada Kepala Syahbandar untuk memperbaiki hal tersebut, karena mereka

**“Yang kita harapkan keselamatan itu diutamakan karena ini pelayanan publik. Kalau KMP Sinar Bangun bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya sehingga keselamatan diabaikan. Ke depannya ini tidak boleh terjadi lagi ...”**

mengeluarkan sertifikat berlayar di Danau Toba.

“Yang kita harapkan keselamatan itu diutamakan karena ini pelayanan publik. Kalau KMP Sinar Bangun bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya sehingga keselamatan diabaikan. Ke depannya ini tidak boleh terjadi lagi dan saya akan terus mengawasi karena saya juga Ketua Umum Tim Pakar mengenai pelayaran,” tegas Legislator Partai Golkar itu. Sebagaimana diketahui, KMP Sinar Bangun mengalami kecelakaan di Danau Toba pertengahan 2018 lalu.

Senada dengan Anthon, Anggota Komisi V DPR RI Unais Ali Hisyam juga mengingatkan kepada penyedia jasa transportasi untuk tidak bermain dengan keselamatan publik. “Walaupun mungkin dia sudah lama menjadi ‘wakil nakhoda’, tetapi keahliannya belum *expert*. Sertifikasi dan kemampuan mengendalikannya harus jelas karena banyak hal yang bisa fatal akibat kecerobohan dari hal tersebut,” pesan Legislator PKB itu. ■ eno/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Mairuf Amin sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menjadi pembicara pada forum Dialektika Demokrasi bertema iBatasan Norma dalam Debat Capresi. Kamis (21/02).  
Foto: Arief/rmi



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia di Ruang Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (14/2/2019).Foto: Azka | Od



Plt. Kepala BK DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberikan sambutan pada FGD dengan tema "Mengkritisi Rancangan Undang - Undang Pertanahan" di Gedung Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Kamis (21/2). Foto: Andri/hrs

